

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

1. Sejarah Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Jejak sejarah instansi pemerintah yang menangani urusan perikanan di kabupaten Tulungagung dapat ditelusuri pada tahun 1951. Pada tahun tersebut, berdiri Jawatan Perikanan Darat Kabupaten Tulungagung yang berlokasi di Kelurahan Tamanan Kabupaten Tulungagung. Jawatan Perikanan Darat Kabupaten Tulungagung merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 1951, Provinsi Jawa Timur diserahkan sebagian urusan perikanan darat oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 1970-an, Jawatan Perikanan Darat Kabupaten Tulungagung menempati kantor baru di kompleks perkantoran sebelah utara Stadion Rejoagung Jl. Pahlawan, Tulungagung. Pada tahun 1983, terjadi perubahan nomenklatur Jawatan Perikanan Darat Kabupaten Tulungagung menjadi Cabang Dinas Perikanan Daerah di Kabupaten Tulungagung. Seiring dengan mulai diterapkannya otonomi daerah, pada tahun 1997, nomenklatur cabang Dinas

Perikanan Daerah di Kabupaten Tulungagung berubah menjadi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tulungagung. Dinas baru ini tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi merupakan salah satu instansi dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dalam perkembangannya, kebijakan pemerintah pusat melahirkan Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Tulungagung merubah nomenklatur Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tulungagung menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung dan menyediakan kantor baru di Jl. Ahmad Yani Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung kembali Pindah Kantor pada tahun 2003, menempati kantor baru di Jl. Ki Mangun Sarkoro No.04, Jepun, Tulungagung.

Pada tahun 2014, terbit Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengurangi sebagian kewenangan dalam urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota dan melimpahkannya ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Restrukturasi perangkat daerah sebagai tindak lanjut UU 23/2014 dilakukan pada tahun 2016 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah. PP18/2016 melalui penerbitan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/ 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam Kepmen KP 45/2016 ini Kabupaten Tulungagung ditetapkan memiliki intensitas dan beban kerja berkategori sedang. Sejak berdiri di tahun 1951 hingga saat ini (tahun 2017), Dinas Perikanan sudah dipimpin 9 kepala Dinas sebagai berikut:

1. Soewarto (1951-1983)
2. Ir. Achmad Slamet (1983-1987)
3. Ir. Umar Said (1987-1997)
4. Ir. Supartono (1997-2008)
5. Drs. Kabib, M.Si. (2008-2010)
6. Drs. Hendry Setyawan, M.Si. (2010-2013)
7. Ir. Sigit Widiono Purwo (2013-2014)
8. Drs. Suprpto, M.M. (2014-2016)
9. Ir. Tatang Suhartono, M.Si. (2016-sekarang)

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:⁶²

Visi :

Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tulungagung sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi

⁶²Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Perikanan terpadu yang berwawasan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Misi :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan jasa sektor kelautan dan perikanan yang berdaya dukung pada perkembangan dunia usaha perikanan.
- b. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat perikanan dan stakeholder dalam rangka pengendalian serta pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan pada lingkungan.
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan tugas operasional dengan pihak terkait guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan.

Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi tentang keadaan yang dicapai dalam jangka waktu 3-5 tahun yang akan datang yang bersifat ideal.

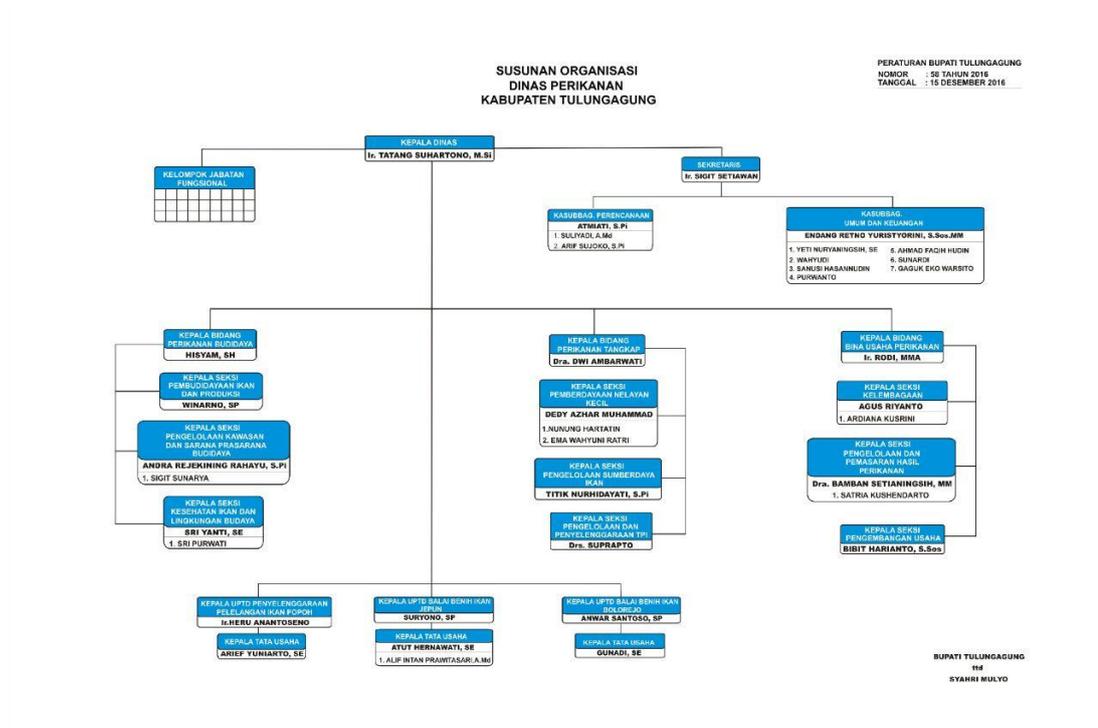
- a. Penyediaan fasilitas dan jasa yang memadai bagi nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara sistematis sehingga memiliki daya saing yang cukup tinggi.
- c. Terwujudnya kondisi lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung.
- d. Meningkatkan hubungan kerja yang koordinatif dan konsultatif dengan mitra kerja dalam rangka meningkatkan peran serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai fasilitator pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran:

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan tentang kondisi tertentu yang ingin dicapai melalui kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dicapai.

- a. Meningkatnya fasilitas dan jasa baik dari segi sarana dan prasarana maupun pelayanan bagi seluruh pelaku usaha perikanan.
- b. Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat perikanan.
- c. Menurunnya tingkat kerusakan pada tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- d. Meningkatkan usaha dan kualitas sumber daya manusia kelompok sasaran program kelautan dan perikanan.

3. Struktur Organisasi



4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi
 - 1) Sub bagian perencanaan;
 - 2) Sub bagian umum dan keuangan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya membawahi:
 - 1) Seksi pemberdayaan ikan dan produksi
 - 2) Seksi pengelolaan kawasan dan sarana prasarana budidaya;
 - 3) Seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 - 1) Seksi pemberdayaan nelayan kecil;
 - 2) Seksi pengelolaan sumberdaya ikan;
 - 3) Seksi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.
- e. Bidang Bina Usaha Perikanan, membawahi:
 - 1) Seksi kelembagaan;
 - 2) Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - 3) Seksi pengembangan usaha.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Peranan Dinas Perikanan dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan melalui pemanfaatan hasil laut di Pantai Popoh

1. Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program bantuan dan pelatihan

Dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan strategi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Tulungagung yaitu dengan memberikan bantuan maupun pelatihan yang mana dengan adanya program tersebut dapat memberikan peluang usaha untuk keluarga nelayan terutama di Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung.

Adapun peranan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan di Pantai Popoh seperti yang dikemukakan oleh Bapak Tatang selaku Kepala Dinas dalam wawancara sebagai berikut:

“Dinas Perikanan membantu nelayan dari hulu sampai hilir seperti membantu nelayan dalam proses penangkapan ikan dengan cara memberikan sarana tangkap seperti jaring, pancing, kapal, JPS untuk mendeteksi potensi ikan, dan memberikan pelatihan baik untuk nelayan maupun istri nelayan seperti mengolah berbagai jenis hasil laut dan memberikan sarana setelah menjadi olahan seperti bantuan perizinan P-IRT dan bantuan memasarkan produk seperti di showroom, *ivent*, pameran produk unggulan dan lain sebagainya.”⁶³

⁶³ Wawancara dengan Tatang selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Tanggal 19 Maret 2018 di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Bidang Tangkap dalam wawancara sebagai berikut⁶⁴:

“Strategi yang dilakukan Dinas Perikanan seperti 1) peningkatan kualitas ikan dengan cara sosialisasi bagaimana penangkapan ikan yang baik dan benar, menjadikan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang bersih dan ikan tidak mudah rusak dengan harapan meskipun tangkapan yang diperoleh sedikit tetapi ikan yang di dapat dalam kondisi bagus maka harga ikan juga akan baik; 2) Bantuan PALKANISASI yang terbuat dari sterofom dengan harapan ikan yang dimasukkan tidak mudah rusak; 3) Memberdayakan nelayan dan keluarga nelayan seperti diversifikasi usaha pelatihan kopi mangrove dan bantuan peralatan serta memberikan bibit mangrove untuk nelayan harapan dengan pengetahuan kalau mangrove dapat dijadikan kopi maka masyarakat berkemauan untuk menanam mangrove diladang sekaligus untuk mengembalikan ekosistem laut; 4) Meningkatkan destinasi wisata melalui kegiatan bersih-bersih pantai “pantai berseri” dengan harapan selain untuk menangkap ikan nelayan juga dapat memanfaatkan kapalnya untuk berwisata; 5) Bekerja sama dengan Badan Antariksa untuk mengetahui posisi ikan agar nelayan dapat langsung menuju ke sumber titik ikan dan bertujuan agar nelayan dapat menghemat BBM”

Seperti yang dapat diketahui Dinas Perikanan memiliki 4 (empat) bidang salah satunya yaitu bidang tangkap yang berfokus untuk nelayan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut⁶⁵:

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, merekomendasi dan mengelola data di bidang perikanan tangkap

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan sumber daya ikan pada Perairan Umum Daratan serta Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan sumberdaya ikan pada

⁶⁴ Wawancara dengan Ambar, Kepala Bidang Tangkap, Tanggal 13 April 2018 di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

⁶⁵ Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Perairan Umum Daratan serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;

- c. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sumber daya ikan, pembinaan serta pemantauan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- d. Pelaksanaan rekomendasi perijinan di bidang perikanan tangkap;
- e. Pengelolaan data di bidang perikanan tangkap;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pemberdayaan nelayan kecil dalam pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan nelayan kecil;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan nelayan kecil;
- c. Merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
- d. Menyusun bahan pembinaan dalam pengembangan usaha bagi nelayan kecil;
- e. Memfasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan dan informasi kepada nelayan kecil;
- f. Memfasilitasi perijinan usaha di bidang perikanan tangkap;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi pengelolaan Sumberdaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya ikan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- c. Merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan sumberdaya ikan;
- d. Menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- e. Melaksanakan peningkatan pengawasan dan konservasi sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- f. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sumberdaya ikan;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dalam pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- c. Merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- d. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelelangan ikan;
- e. Melakukan pendataan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Dari penjelasan diatas bahwa Dinas Perikanan memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan pendapatan keluarga nelayan, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Hartatik dalam wawancara sebagai berikut⁶⁶:

“Bantuan dan pelatihan yang telah saya dapatkan dari Dinas Perikanan yaitu berupa pelatihan pembuatan kerupuk serta bantuan peralatan pembuatan kerupuk dan penggilingan terasi”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program yang diberikan untuk masyarakat nelayan popoh memiliki dampak yang positif dapat dilihat dari perubahan yang telah dirasakan oleh nelayan saat ini sebelum dan sesudah diberikan bantuan maupun pelatihan oleh Dinas Perikanan.

2. Cara mendapatkan bantuan dan pelatihan

Untuk mendapatkan bantuan dan pelatihan dari Dinas Perikanan sebenarnya tidak terlalu sulit, akan tetapi syarat untuk mendapatkan

⁶⁶ Wawancara dengan Hartatik, Istri Nelayan Pantai Popoh, Tanggal 21 April 2018 di Pantai Popoh

bantuan maupun pelatihan harus memiliki kelompok nelayan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tatang dalam wawancara sebagai berikut⁶⁷:

“Dinas Perikanan memberikan bantuan kepada nelayan, yang salah satu persyaratannya adalah memiliki kelompok nelayan terlebih dahulu dengan demikian mereka dapat mendapatkan bantuan tersebut dengan mengajukan proposal ke Dinas Perikanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok tersebut”

Dalam hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Bamban dalam wawancara sebagai berikut⁶⁸:

“Dinas Perikanan tidak bisa memberikan bantuan kepada individu melainkan harus melalui kelompok usaha bersama atau KUB”

Selain diharuskan memiliki kelompok persyaratan yang harus dipenuhi oleh para nelayan adalah memiliki jumlah anggota sebanyak 10 sampai 15 orang, didalam kelompok tersebut terdapat kepengurusan berupa ketua kelompok, sekretaris, bendahara, seksi-seksi sesuai dengan pengurusan.

Dalam hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Ambar dalam wawancara sebagai berikut⁶⁹:

“Untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan yaitu seperti mengajukan proposal ke Dinas setelah itu dinas memproses proposal tersebut, nelayan memiliki jumlah anggota sebanyak 10 sampai 15 orang, didalam kelompok tersebut terdapat kepengurusan seperti kelompok, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan pengurusan”

⁶⁷ Wawancara dengan Tatang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung,,

⁶⁸ Wawancara dengan Bamban, Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Bidang Bina Usaha, Tanggal 13 April 2018 di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten tulungagung

⁶⁹ Wawancara dengan Ambar, Kepala Bidang Tangkap, Tanggal 13 April 2018,,

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sebenarnya para nelayan sangatlah mudah untuk mendapatkan bantuan maupun pelatihan dari Dinas Perikanan, dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁰

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah suatu kelompok usaha yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh kepentingan, kebutuhan, dan keinginan bersama untuk melakukan usaha secara bersama, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Bidang usaha KUB antara lain penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, maupun usaha pendukung lainnya (*docking*, perbengkelan, toserba, dsb).

Manfaat KUB yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota
2. Memperluas kesempatan kerja
3. Memudahkan akses dan penghimpunan dana modal
4. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha
5. Memperluas dan memudahkan akses informasi dan teknologi
6. Meningkatkan kemajuan kelompok usaha
7. Meningkatkan kemampuan manajemen usaha
8. Meningkatkan kualitas produk
9. Meningkatkan dan memperluas akses pemasaran
10. Sebagai wahana untuk menjalin kemitraan usaha

Kriteria pengurus KUB:

1. Mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan KUB beserta anggotanya
2. Cakap dan berpengetahuan luas
3. Terampil, kreatif dan inovatif
4. Bertanggung jawab
5. Rela berkorban untuk kemajuan KUB
6. Selalu mendahulukan kepentingan anggota
7. Bersedia menjalankan dan mengelola usaha secara sungguh-sungguh

Cara membentuk KUB:

1. Mengidentifikasi sumberdaya yang tersedia
2. Menentukan jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan
3. Menjelaskan kepada calon anggota tentang manfaat KUB

⁷⁰ Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

4. Mengadakan rapat pembentukan KUB dengan agenda membuat kesepakatan tentang nama, tempat, sekretariat, bidang usaha, serta permodalan (dalam AD/ART KUB)
 5. Membuat rencana operasional KUB
- Langkah menyusun rencana KUB:
1. Menetapkan tujuan dengan jelas
 2. Menyusun langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan
 3. Membuat jadwal kegiatan yang terencana
 4. Membagi tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing pengurus
 5. Menetapkan jenis usaha serta volumenya secara tepat
 6. Merencanakan pengadaan bahan baku
 7. Merencanakan pengembangan usaha
 8. Membuat proyeksi pengembalian modal
 9. Menyusun dan menetapkan agenda rapat pengurus dan anggota

Tabel 1.1

Data Nama Kelompok Di Pantai Popoh

| No. | Nama Kelompok | Nama Ketua | Jumlah |
|------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Mina Ngasap | Hartatik | 10 |
| 2. | Mina Mitra Kencana | Slamet | 10 |
| 3. | Laskar Bahari | Moh. Sadad | 14 |
| 4. | Mina Supiya Popoh | Mustadji | 10 |
| 5. | Mina Abadi | Ahmad Enggar S | 11 |
| 6. | Manunggal Roso | Joko Dwiono | 12 |
| 7. | Mina Langgeng Jaya | Jali | 10 |
| 8. | Mina Langgeng Berkah | Eko Sutrisno | 11 |
| 9. | Sinar Laut | Riyoni | 13 |
| 10. | Sinar Samodra | Sulam | 13 |

C. Hasil Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan melalui pemanfaatan hasil laut di Pantai Popoh

Dengan diadakannya program bantuan dan pelatihan untuk nelayan pantai popoh masyarakat menjadi lebih produktif, karena tercukupinya sarana dan prasarana maupun pengetahuan yang dimiliki. Masyarakat nelayan pantai popoh memang sangat merasakan dampak dari bantuan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sulam, dalam wawancara sebagai berikut⁷¹:

“Dengan adanya bantuan dari Dinas Perikanan saya merasakan dampak yang sangat baik seperti hasil tangkapan yang saya peroleh menjadi semakin baik kualitasnya dan pendapatan saya pun semakin meningkat meskipun tidak banyak setidaknya sudah ada peningkatan dari sebelumnya”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Slamet, dalam wawancara sebagai berikut⁷²:

“Dahulu sebelum saya mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan saya masih ikut orang untuk melaut dan hasil tangkapanpun harus dibagi dengan teman-teman, setelah saya mendapatkan bantuan kapal dari Dinas Perikanan saya menjadi memiliki pendapatan yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya saat ini”

⁷¹ Wawancara dengan Sulam, Nelayan Pantai Popoh, Tanggal 19 April 2018 di Kampung Nelayan Pantai Sidem

⁷² Wawancara dengan Slamet, Nelayan Pantai Popoh, Tanggal 21 April 2018 di Pantai Popoh

Dalam hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Yatini dalam wawancara sebagai berikut⁷³:

“Saya mendapatkan pelatihan dan bantuan dari Dinas Perikanan yaitu berupa pelatihan pembuatan kerupuk dan bantuan alat-alat untuk membuat kerupuk, alhamdulillah dari usaha ini saya dapat membantu suami untuk mencari ekonomi tambahan selain dari pekerjaan suami saya yang menjadi nelayan”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Tatang selaku Kepala Dinas Perikanan Tulungagung, sebagai berikut⁷⁴:

“Nelayan pantai popoh saat ini sudah sedikit berkembang yang mana dapat kita lihat dari semakin banyaknya hasil tangkapan yang didapatkan dan nelayan juga memiliki usaha sendiri seperti pembuatan kerupuk ikan, pengasapan, pedagang makanan”

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk nelayan pantai popoh yaitu tepat sasaran, yang mana para nelayan di pantai popoh merasakan betapa pentingnya peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian keluarga nelayan di Pantai Popoh tersebut.

Tabel 1.2

Data Bantuan untuk Nelayan Pantai Popoh

| Nama Kegiatan | Barang yang dibantukan |
|--|---|
| Pengadaan Alat Penangkap Ikan | Jaring angkat, Jaring Tarik, Jaring Jebak |
| Pengadaan Peralatan memasak dan Alat Pembuat Kerajinan | Timbangan Digital 5 Kg, Mesin Sealer, Mesin Penggiling Tepung beserta GX 160, Mesin Gerinda (Mesin Pemetong), Alat Pengecetan |
| Pengadaan bahan Praktek Permesinan | Oli mesin diesel, Oli mesin bensin, Dexlite, Peralite, Jurigen, Baskom, |

⁷³ Wawancara dengan Yatini, Istri Nelayan Pantai Popoh, Tanggal 21 April 2018, di Pantai Popoh

⁷⁴ Wawancara dengan Tatang, Kepala Dinas Perikanan Tulungagung

| | |
|--------------------------------|---|
| | Pelumas, Tes mesin bensin, Tes mesin diesel, Kain lap mikrofiber, Amplas, Kuas, Palu besi, Gergaji, Obeng ketok, Obeng +, Obeng -, Tang biasa, Tang buaya, Tang potong, Kunci L, Kunci Y, Kunci Y, Kunci T, Kunci T, Kunci T, Kunci T, Kunci T, Kunci shock, kunci busi, Kunci ring, Kunci pass |
| Pengadaan Peralatan Permesinan | Kunci pas, Kunci ring, Kunci sok, Tang buaya, Kompresor plus, Kunci treeker, Tool box |
| Bantuan Alat Pengolahan | Gilingan daging, pengaduk (mixer besar), alat pemotong kerupuk, timbangan digital, hand sealer, telenan, ember plastik, freezer, pisau filet, para-para, basket tanpa lubang, cool box, meja proses |

D. Kendala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan di Pantai Popoh.

Ada banyak sisi ataupun dampak positif yang dirasakan oleh para nelayan yang ada di Pantai Popoh Tulungagung seperti yang sudah dijelaskan diatas, namun dari dampak positif yang dirasakan banyak kendala yang dialami oleh nelayan dan Kantor Dinas selama ini. Sehingga proses pelatihan dan bantuan menjadi terhambat karena terdapat beberapa kendala seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tatang dalam wawancara sebagai berikut⁷⁵:

“Pantai di Kabupaten Tulungagung sangatlah luas akan tetapi anggaran dananya pun terbatas, jadi untuk bantuan nelayan harusnya bersabar untuk mendapatkannya, bukan berarti Dinas tidak mengusahakannya, dinas selalu berusaha agar semua nelayan memiliki perekonomian yang layak.”

⁷⁵ Wawancara dengan Tatang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung....,

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa di Kabupaten Tulungagung memiliki begitu banyak pantai dan di sini Dinas Perikanan memiliki peranan yang cukup penting, akan tetapi Dinas pun juga mengalami hambatan salah satunya yaitu keterbatasan dana, dana dari pemerintah pusat harus dapat di kelola sedemikian rupa untuk mensejahterakan masyarakat pada khususnya di sini yaitu para nelayan, sehingga untuk memberikan bantuan maupun pelatihan nelayan haruslah bersabar.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga nelayan di pantai popoh. Kendala yang terjadi akan menghambat nelayan untuk meningkatkan pendapatannya. Berikut ini beberapa kendala Eksternal yang dihadapi oleh nelayan pantai Popoh menurut beberapa bagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Nelayan bergantung kepada alam. Alam memang sangat mendukung pekerjaan bagi nelayan. Jika alam cerah dan laut dalam keadaan surut maka nelayan akan lebih mudah dalam mencari ikan. Namun sudah beberapa tahun terakhir ini musim tidak mendukung sehingga nelayan susah mencari ikan.
- b. Ekosistem yang sudah rusak. Karena ekosistem laut yang semakin lama semakin rusak penangkapan ikan dilaut oleh para nelayan juga semakin sulit, sehingga pendapatan nelayan juga semakin menurun.

- c. Nelayan dipantai Popoh Kabupaten Tulungagung tersebut tergolong sebagai nelayan kecil. Jadi alat (kapal) yang digunakan untuk mencari atau menangkap ikan juga kecil, sedangkan saat ini ikan berada ditengah laut dan nelayan tidak dapat menjangkau dikarenakan kapal (perahu) yang digunakan tidak dapat menjangkau area yang banyak ikannya.
- d. Pantai sudah rusak akibat campuran air dari bendungan niama.
- e. Dari usaha dinas untuk memberikan pelatihan seperti nuget, bakso kepada nelayan setelah pelatihan selesai masyarakat tidak mau mengembangkannya dan kembali lagi ke profesi awal seperti pengasapan, pemindangan dan lain-lain.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan nelayan di pantai popoh sangatlah bergantung kepada alam apalagi pantai popoh sekarang tidak sebersih dahulu dan ekosistem sudah mengalami kerusakan, dan ditambah lagi nelayan di pantai popoh tergolong nelayan kecil yang mana perahu untuk mencari ikanpun juga kecil dan posisi ikan berada ditengah jadi nelayanpun tidak dapat menjangkau keberadaan ikan. Nelayan di pantai popoh mayoritas hanya mengandalkan laut saja dan pada saat ini laut mengalami masalah atau dapat di katakan musim paceklik karena sudah kurang lebih 3 tahun ini ikan tidak muncul ditambah lagi ekosistem yang semakin rusak maka demikian nelayan harus memiliki kerja sambilan seperti pembuatan kopi mangrove agar keluarga nelayan tetap dapat bertahan hidup meskipun musim paceklik tiba.

E. Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi permasalahan guna meningkatkan pendapatan keluarga nelayan di Pantai Popoh.

Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan di Pantai Popoh seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tatang dalam wawancara sebagai berikut:

“Dalam mengatasi permasalahan yang ada dilapangan kami memberikan baik bantuan maupun pelatihan kepada nelayan dengan harapan dengan adanya tambahan sarana tangkap nelayan akan memperoleh hasil tangkapan yang layak dan dengan peralatan memadai akan mendapatkan hasil yang baik”

Dengan memberikan bantuan maupun pelatihan bertujuan agar masyarakat nelayan dapat mengembangkan potensi baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang ada disekitar dan dapat membantu memajukan perekonomian masyarakat terutama di pantai popoh.

Dalam hal ini juga dipaparkan oleh Ibu Ambar dalam wawancara sebagai berikut⁷⁶:

“Seperti yang dapat kita ketahui nelayan di Pantai Popoh mayoritas tergolong nelayan kecil agar pendapatan nelayan tetap baik maka upaya yang dilakukan oleh Dinas yaitu peningkatan kualitas ikan dengan harapan meskipun tangkapan yang didapatkan oleh nelayan sedikit tetapi ikan yang didapatkan dalam kondisi bagus maka harga ikan juga akan ikut membaik dan dengan cara sosialisasi bagaimana penangkapan ikan yang baik dan benar, menjadikan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang bersih jadi ikan tidak mudah busuk dan bantuan Program PALKANISASI yang terbuat dari sterofom dengan harapan ikan yang di masukkan tidak mudah rusak, selain itu upaya kami yaitu seperti meningkatkan destinasi wisata melalui

⁷⁶ Wawancara dengan Ambar selaku Kepala Bidang Tangkap....,

kegiatan bersih-bersih pantai dan memanfaatkan kapal nelayan untuk berwisata”

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Bamban dalam wawancara sebagai berikut⁷⁷:

“Kami selalu memberikan dukungan kepada nelayan dan selalu memberikan bimbingan jika nelayan mengalami kesulitan dalam hal apapun terutama jika istri nelayan mengalami kesulitan baik dalam hal pengolahan maupun pemasaran”

Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Sulam dalam wawancara sebagai berikut:

“Dinas Perikanan sering memberikan pelatihan baik itu kepada nelayan maupun istri nelayan seperti yang baru saja di berikan dinas yaitu pelatihan kopi mangrove dan pelatihan cara menangkap ikan yang baik”

Dinas perikanan juga memberikan kemudahan kepada nelayan untuk mendapatkan bantuan maupun pelatihan seperti jika dinas mengadakan pelatihan untuk nelayan maka dinas lah yang datang ke tempat pelatihan tersebut, hal ini bertujuan agar minat nelayan lebih besar untuk menghadiri pelatihan tersebut. Dinas perikanan juga bekerja sama dengan Badan Antariksa untuk mengetahui posisi ikan agar nelayan dapat langsung menuju ke sumber titik ikan hal ini bertujuan agar nelayan dapat menghemat BBM (Bahan Bakar Minyak). Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Dinas Perikanan juga memberikan akses berupa Asuransi nelayan seperti yang dipaparkan dibawah ini⁷⁸:

⁷⁷ Wawancara dengan Bamban selaku KASI Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan....,

⁷⁸ Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

SIMANTEP (Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya) produk asuransi perlindungan kecelakaan diri plus bagi nelayan hadir untuk menjawab tantangan dan kebutuhan perlindungan asuransi nelayan Indonesia.

program prioritas asuransi nelayan merupakan sebuah program pemerintah yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No: 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Nilai Manfaat:

1. Kematian akibat kecelakaan
 - a. Saat aktivitas penangkapan ikan di perairan (A.1) : 100% Harga Pertanggungan
 - b. Selain aktivitas penangkapan ikan di perairan (A.2) : 10 % Harga Pertanggungan
2. Cacat tetap : maksimal 50% Harga Pertanggungan
3. Biaya pengobatan akibat kecelakaan : maksimal 10% Harga Pertanggungan (sesuai bukti pembayaran)
4. Extra benefit 10% harga pertanggungan, kematian akibat selain kecelakaan

Kriteria Nelayan:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Terdaftar memiliki Kartu Nelayan/Kartu Pelaku Usaha Kelautan Perikanan (Kartu KUSUKA)
3. Nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan buruh
4. Memiliki aktivitas penangkapan ikan di perairan laut dan perairan darat
5. Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran
6. Diutamakan nelayan tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Nelayan, Perusahaan dan Kelompok Kolektif lainnya.

Prosedur Klaim:

1. Apabila terjadi suatu peristiwa yang berpotensi menimbulkan tuntutan klaim, tergantung klaim, tertanggung/ahli waris/keluarga tertanggung melaporkan kejadian klaim kepada ketua kelompok nelayan/agen jasindo/ kantor jasindo terdekat.
2. Tertanggung/ahli waris/ keluarga tertanggung melengkapi dokumen sesuai kejadian yang dialami tertanggung
3. Proses klaim oleh Asuransi Jasindo
 - a. Nelayan tertanggung memiliki Kartu Nelayan
 - b. Nelayan tertanggung tercantum dalam polis
 - c. Klaim terjadi dalam masa pertanggungan
 - d. Penyebab klaim terjamin polis
 - e. Dokumen klaim lengkap

4. Apabila klaim terjamin kondisi polis dan nelayan telah memenuhi persyaratan klaim, maka akan dilakukan pembayaran klaim.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan selama ini selalu berupaya agar kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya di Pantai Popoh selalu meningkat, meskipun juga terdapat beberapa kendala namun Dinas Perikanan berusaha agar kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Peranan Dinas Perikanan pun sangat dirasakan oleh nelayan meskipun belum maksimal akan tetapi dinas selalu berusaha untuk kesejahteraan nelayan.